



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaihan yang dilakukan oleh *Harian Kompas* dan *Media Indonesia* dalam memberitakan dana aspirasi DPR. Setelah kesembilan berita tersebut dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua media melakukan *framing* yang berbeda terhadap kasus dana aspirasi ini.

Pendefinisian masalah dari kasus ini berbeda di antara kedua media. *Harian Kompas* mendefinisikan pengusulan program dana aspirasi ini merupakan penyimpangan dari tugas-tugas dasar DPR. Sementara *Media Indonesia* melihat program dana aspirasi bertentangan dengan program pembangunan nasional. Program ini bahkan disebut bisa mengacaukan administrasi negara. Meski begitu, kedua media sama-sama memandang usulan program dana aspirasi sebagai hal yang negatif.

Harian Kompas menyatakan sumber masalah program dana aspirasi berasal dari penafsiran UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 80 huruf (j) yang menyatakan hak anggota dewan mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Sementara *Media Indonesia* menilai dana aspirasi tidak memiliki landasan hukum yang kuat, peruntukannya tidak tepat sasaran, terlalu berisiko, dan akan menimbulkan kekaburan tugas antara pemerintah dan DPR.

Keputusan moral yang dipakai kedua media pada dasarnya memiliki bingkai yang sama, yakni program dana aspirasi tidak berujung pada keadilan dan tidak akan mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Program ini juga ditolak karena berpotensi menimbulkan celah korupsi. *Harian Kompas* juga menekankan bahwa program ini hanya dipakai untuk kepentingan politis para anggota dewan dan mengajari masyarakat akan budaya politik yang tidak sehat.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh kedua media pada dasarnya berbeda. *Harian Kompas* merekomendasikan agar anggota dewan kembali pada fungsi dasar masing-masing agar tidak bertentangan dengan fungsi eksekutif. *Harian Kompas* juga menawarkan penyelesaian yakni fraksi-fraksi di DPR harus kompak menolak program dana aspirasi ini, sehingga programnya dapat dibatalkan seperti usulan tahun-tahun sebelumnya. Penyelesaian berikutnya adalah mempercepat dan memaksimalkan Pola Musyawarah Pembangunan di setiap daerah. *Media Indonesia* juga menawarkan solusi yang sama, hanya saja program tersebut ditulis sebagai “program musrenbang”.

Media Indonesia, yang berafiliasi dengan Partai Nasdem, cenderung membingkai program dana aspirasi ini dengan menonjolkan partai-partai yang terlibat, terutama Partai NasDem. Hal ini terlihat dari judul yang menyebutkan partai tertentu, seperti “NasDem Tolak Dana Aspirasi” dan “Fraksi Partai Hanura juga Tolak Dana Aspirasi”. Sementara *Harian Kompas* tidak menyebutkan partai tertentu dalam judul berita dan tidak menonjolkan salah satu partai dalam pemberitaan. Pernyataan yang dimuat

Media Indonesia dalam beritanya pun lebih banyak mengambil dari pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrat. *Media Indonesia* juga menaruh perhatian lebih terhadap isu ini dengan beberapa kali membahas isu ini dalam editorialnya.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis mengenai *framing* dana aspirasi di *Harian Kompas* dan *Media Indonesia*, peneliti mempunyai beberapa saran:

1. Penelitian ini membahas kebijakan publik, khususnya hanya mengenai kebijakan anggaran. Maka penelitian berikutnya dapat menganalisis pembingkaiian tentang kebijakan publik di bidang lainnya sehingga memperkaya penelitian yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat.
2. Penelitian kualitatif mampu menunjukkan kecenderungan media berdasarkan konteks, proses, dan pengeksposan dari teks yang diteliti. Namun untuk mendapatkan data berapa banyak cakupan isu dan prioritas pemberitaan misalnya, maka penelitian selanjutnya tentang kebijakan publik dapat dilengkapi dengan penelitian secara kuantitatif dengan jumlah sampel yang lebih luas untuk mendapatkan perspektif lain.
3. Penelitian ini membahas pembingkaiian isu kebijakan publik menggunakan model *framing* Robert Entman. Dimensi *framing* milik Robert Entman dibagi menjadi dua: seleksi isu dan penonjolan aspek. Namun peneliti hanya fokus membahas dimensi penonjolan aspek dalam

pemberitaan. Proses dimensi seleksi isu dalam pemberitaan bisa dibahas dalam penelitian selanjutnya, misalnya dengan melakukan wawancara mendalam dengan reporter dan redaktur terkait proses penulisan berita.

4. Dalam model *framing* yang terintegrasi seperti dalam model proses *framing* milik Claes de Vreese (2005, h. 52), selain menjelaskan hubungan proses pembingkaihan yang dimulai dari internal media massa hingga karakteristik jurnalis yang memengaruhi pembingkaihan berita, model ini juga menjelaskan efek dari pembingkaihan tersebut. Maka peneliti menyarankan studi berikutnya untuk menganalisis efek *framing* mengenai kebijakan publik. Efek *framing* penting juga untuk diteliti untuk mengetahui pengaruh dari pembingkaihan isu dalam berita terhadap penentuan kebijakan publik. Sebagai contoh, Schuck dan de Vreese (2006, h. 12-16) meneliti efek *framing* terhadap dukungan publik dalam berita mengenai kebijakan Perluasan Uni Eropa menggunakan analisis isi pada koran nasional dan regional Jerman dan eksperimen terhadap mahasiswa sebuah universitas di Jerman. Penggunaan analisis isi kuantitatif juga dapat membantu menghilangkan subjektivitas peneliti saat melakukan analisis *framing* (Van Gorp, dalam D'Angelo dan Kuypers, 2009, h. 93).